

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKARAME  
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FAIZUL HAMDY HASIBUAN**  
**NPM : 1403090019**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **FAIZUL HAMDY HASIBUAN**  
N P M : 1403090019  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018  
Waktu : 08.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. EFENDI AUGUS, M.Si**  
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**  
PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. RUDIANTO, M.Si**

  
**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **FAIZUL HAMDI HASIBUAN**  
N P M : 1403090019  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Medan, 06 Maret 2018

PEMBIMBING

  
Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si

DISETUJUI OLEH:  
KETUA JURUSAN,

  
Dr. ARIFIN SALEH, M.SP

DEKAN,

  
Dr. ADIANTO, M.Si



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Faizul Hamdi Hasibuan, NPM 1403090019, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya tulis dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarsarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan,



Faizul Hamdi Hasibuan

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKARAME  
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**FAIZUL HAMDI HASIBUAN**

**1403090019**

Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Melihat permasalahan itu, lahirlah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum dalam tata Pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada Pemerintahan Desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan program-program pembangunan desa. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan atau Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah dijalankan sesuai dengan prosedur. Hal ini dibuktikan bahwa sudah terealisasi pemberdayaan dan pembangunan di Desa Sukarame sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hanya saja, fokus Pemerintah Desa Sukarame menggunakan Anggaran ini untuk pembangunan dan bukan kepada pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Anggaran Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Partisipasi**

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah-nya kepada seluruh umat manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara “.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikannya. Namun penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan motivasi, masukan, dan nasehat khususnya kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda Syahrul Adnan Hasibuan, SE dan Ibunda Rismawati yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sampai detik ini dan juga membesarkan penulis yang tidak pernah kenal lelah sehingga penulis mendapatkan gelar sarjana. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam, M. Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M. Ikom. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S. Sos., M. Ikom. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos., M.SP. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Mujahiddin, S. Sos., M. SP. Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Mohd Yusri Isfa, M. Si. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Jalaluddin, S. Ag selaku Kepala Desa Sukarame yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian di Desa tersebut.
10. Kepada Saudara Kandungku Abang Fayakun Nasyimsyah, SH dan Kak Fitriyah Nur Hasibuan yang telah memberikan motivasi.

11. Kepada Retno Wulansari, Ahmad Maherdika, Muhammad Nazri Manday, dan Asnawi Ahmad selaku teman seperjuangan yang telah memberikan penulis pinjaman buku untuk mempermudah dalam pengerjaan skripsi.
12. Kepada kawan-kawan Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Labuhanbatu Utara, Barisan Mahasiswa Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Dan yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Kelas Pagi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk seluruh pihak.

Medan, Maret 2018

**Faizul Hamdi Hasibuan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	9
A. Implementasi.....	9
1. Definisi Implementasi.....	9
2. Implementasi Kebijakan.....	10
3. Hakikat Implementasi.....	11
4. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.....	11
5. Pendekatan Implementasi.....	12
B. Desa.....	14
1. Pengertian Desa.....	14
2. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	14
3. Pengalokasian Anggaran Dana Desa.....	15
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	20
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	21
4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	25
6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	25

D. Pengertian Partisipasi.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Kerangka Konsep.....	30
C. Definisi Konsep.....	31
D. Kategorisasi.....	31
E. Informan atau Narasumber.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Lokasi Penelitian.....	35
I. Gambaran Umum Kantor Desa Sukarame.....	35
1. Sejarah Desa.....	35
2. Demografi Desa.....	36
3. Visi dan Misi Desa.....	38
4. Pembagian Tugas dan Fungsi.....	40
5. Program Kerja Bidang Pembangunan.....	45
6. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	46
7. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	48
8. Struktur Organisasi.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Analisa Data Wawancara.....	55
C. Pembahasan.....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	30
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	34
Gambar 3.3 Struktur Organisasi.....	50

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa.....	36
Tabel 3.2 Program Kerja Bidang Pembangunan.....	46
Tabel 3.3 Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	47
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	48
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan sumber daya manusia seutuhnya dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya : Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat

(Bambang, Hidayana) dalam Jusman (2016). Kemudian yang kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk menghidupi keluarganya. Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk diatasi apalagi ingin dihilangkan. Malah sebaliknya, kemiskinan setiap tahunnya semakin meningkat ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dengan kondisi tersebut. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Selanjutnya, lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dibuat sertadiimplementasikan di desa untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa,

salah satunya kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

Anggaran Dana Desa yang ada selanjutnya dikelola oleh pemerintahan desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkannya UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat melalui PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang juga mengatur mekanisme pelaksanaan ADD dan pengalokasiannya.

Melalui Alokasi Anggaran Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan dan pemberdayaan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu

pola pengelolaan yang baik, pola tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat desa ke arah yang positif serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu diimplementasikan melalui Peraturan Desa Sukarame Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Sukarame Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukarame yaitu sebesar Rp. 874.622.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang berupa Anggaran Dana Desa dan Dana Desa. Anggaran ADD diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, pembangunan kantor dan sebagainya.

Akan tetapi, realita yang terjadi di Desa Sukarame menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

dan pemberdayaan di desa masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan ADD mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak. Masyarakat desa yang seharusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa cenderung hanya sebagai penonton dalam setiap program pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai hal, seperti minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan perubahan yang terjadi di desa.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan **judul “Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi

Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana penerapan alokasi anggaran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Sukarame dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi anggaran dana desa.

### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

## **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Desa, Pengertian Dana Desa/Alokasi Dana Desa, Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Partisipasi, Pengertian Sumber Daya Manusia.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi**

##### **1. Definisi Implementasi**

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara, 2014 : 232), *to implement* (mengimplentasikan) berarti *to providethe means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014 : 232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Nurdin (2002 : 70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Nugroho (2004 : 163) Implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

## **2. Implementasi kebijakan.**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

## **3. Hakikat Implementasi Kebijakan.**

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2016 : 128) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

#### **4. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.**

Ada dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. Pertama, konsep tentang peralatan kebijakan (policy instrument). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang ingin dicapai. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melaksanakan implementasi. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Disamping kedua konsep tersebut, dilapangan kita menjumpai beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor teknis, faktor administratif, dan hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi Levitt dalam (Abidin, 2012 : 154). Faktor teknis itu antara lain berkenaan dengan:

1. Kondisi teknis dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kimia pabrik.
2. Intensitas tingkat keparahan permasalahan, yang menunjukkan tingkat bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah, apakah suatu masalah masih berada dibawah ambang batas atau sudah melampauinya.
3. Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Faktor administratif meliputi aspek-aspek administratif dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut, antara lain :

1. Status kebijakan.
2. Peralatan kebijakan.
3. Sistem administrasi dan lingkungan kerja yang ada.
4. Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan.

Sementara itu, hubungan kerja antar instansi yang terkait, antara lain mencakup :

1. Kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.
2. Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing instansi.
3. Teknik komunikasi yang dipakai.

#### **5. Pendekatan Implementasi.**

Menurut Abidin (2012 : 155) Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas kebawah. Apa yang di implementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Namun dalam masyarakat yang demokratis, seperti yang telah diungkapkan peranan rakyat sebagai pemiliki Negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan struktural.

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi.

2. Pendekatan prosedural dan manajerial.

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, evaluation, dan review technique (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, yang penting dalam proses implementasi adalah tata urutan, baik dalam pengertian prioritas berdasarkan signifikansi maupun prioritas menurut waktu.

### 3. Pendekatan Kejiwaan.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan.

### 4. Pendekatan politik.

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Hogwood and Gunn dalam (Abidin, 2012:157).

## **B. Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2. Pengertian Anggaran/Alokasi Dana Desa**

Menurut (Makawimbang, 2016 : 110-111) dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### 3. Pengalokasian Anggaran Dana Desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa juga diatur (dalam PP No.72 Tahun 2005) dengan formula berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times \text{DBH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{Belanja Pegawai}$$

Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detail lagi dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara pernghitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai pertanggungjawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, yaitu :

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Diperlukan pelaporan setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai dengan tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBDes dan diluar untuk anggaran ADD.

Selanjunya dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula. Dalam penetapan formula terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu adalah pengurangannya belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No. 43 Tahun 2014 ini pengurangannya adalah Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai

dalam APBD merupakan proporsi yang dominan, sehingga tentunya akan memberatkan bagi pemerintah daerah jika mereka harus menyalurkan ADD ke desa sesuai dengan formula dalam PP No. 43 Tahun 2014, berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times \text{DBH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{DAK}$$

Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk disetiap desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal. Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen tambahan sebesar 30%.
2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional. Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa. Sedangkan Variabel independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari indicator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan jumlah unit komunitas (dusun).

Melalui Alokasi Anggaran Dana Desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan. Kebijakan ADD yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan juga mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten/kota.

### **C. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradig baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable* Chambers dalam Mardikanto, (2017 : 49).

Menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto, (2017 : 52), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Menurut Mubyarto

dalam Mardikanto, (2017:52) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat Mardikanto (2017) diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Subejo dan Narimo dalam Mardikanto, (2017 : 32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

## **2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Mathews menyatakan bahwa : *prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Mardikanto (2017 : 105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip :

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan dimasa-masa mendatang.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya. Misalnya dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kerdil/ subur akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan.

### **3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.**

Menurut Mardikanto, (2017 : 111) Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (Better Education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

2. Perbaikan aksesibilitas (Better Accessibility) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (Better Action) dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (Better Institution) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
5. Perbaikan usaha (Better business) dengan perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (Better income) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan (Better environment) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan (Better living) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga masyarakat.

9. Perbaiki masyarakat (Better community) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### **4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.**

Axinn dalam Mardikanto,(2017 : 159) mengartikan pendekatan sebagai suatu gaya yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (the style of action within a system). Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel dalam Mardikanto, (2017:159) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan :

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan.
2. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan.
3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan.
4. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara :
  - a. Publik ataukah swasta.
  - b. Pemerintah ataukah non-pemerintah.
  - c. Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah (partisipatif).
  - d. Mencari keuntungan ataukah non-profit.
  - e. Karitatif ataukah mengembalikan biaya.
  - f. Umum ataukah sektoral.
  - g. Multi-tujuan ataukah tujuan tunggal.
  - h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

Terkait dengan hal itu, pelaksanaan proses dan tujuan yang dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parson, et al dalam Mardikanto, (2017 : 160) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam artian mengaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya, oleh karenanya dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni :

1. Pendekatan Mikro.
2. Pendekatan Mezzo.
3. Pendekatan Makro.

Di pihak lain, pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu :

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup:
  - a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat bukan untuk mencapai tujuan orang luar atau penguasa.
  - b. Pilihan kegiatan, metoda maupun teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat.

- c. Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran yang dibawa oleh fasilitator atau berasal dari luar tetapi berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat.
2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

#### **5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.**

Ismawan dalam Mardikanto, (2017 : 170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Pengembangan kelembagaan kelompok;
3. Pemupukan modal masyarakat;
4. Pengembangan usaha produktif;
5. Penyediaan informasi tepat-guna

## **6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.**

Agar para fasilitator mengetahui focus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indicator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan Girvan dalam Mardikanto, (2017 : 289) yakni:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dll.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun, mandi). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier seperti lemari, TV, dll.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan keluarga.
5. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui salah satu nama pegawai pemerintahan desa/kelurahan.

6. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
7. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, asset produktif, tabungan.

Lebih lanjut, Mardikanto (2003) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan;
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan;
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian;
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan;
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah;
7. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan;
8. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan;
9. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

#### **D. Pengertian Partisipasi**

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Bornby dalam Mardikanto, (2017 : 81) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Beal dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Sebagai suatu kegiatan, Verhagen dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data.

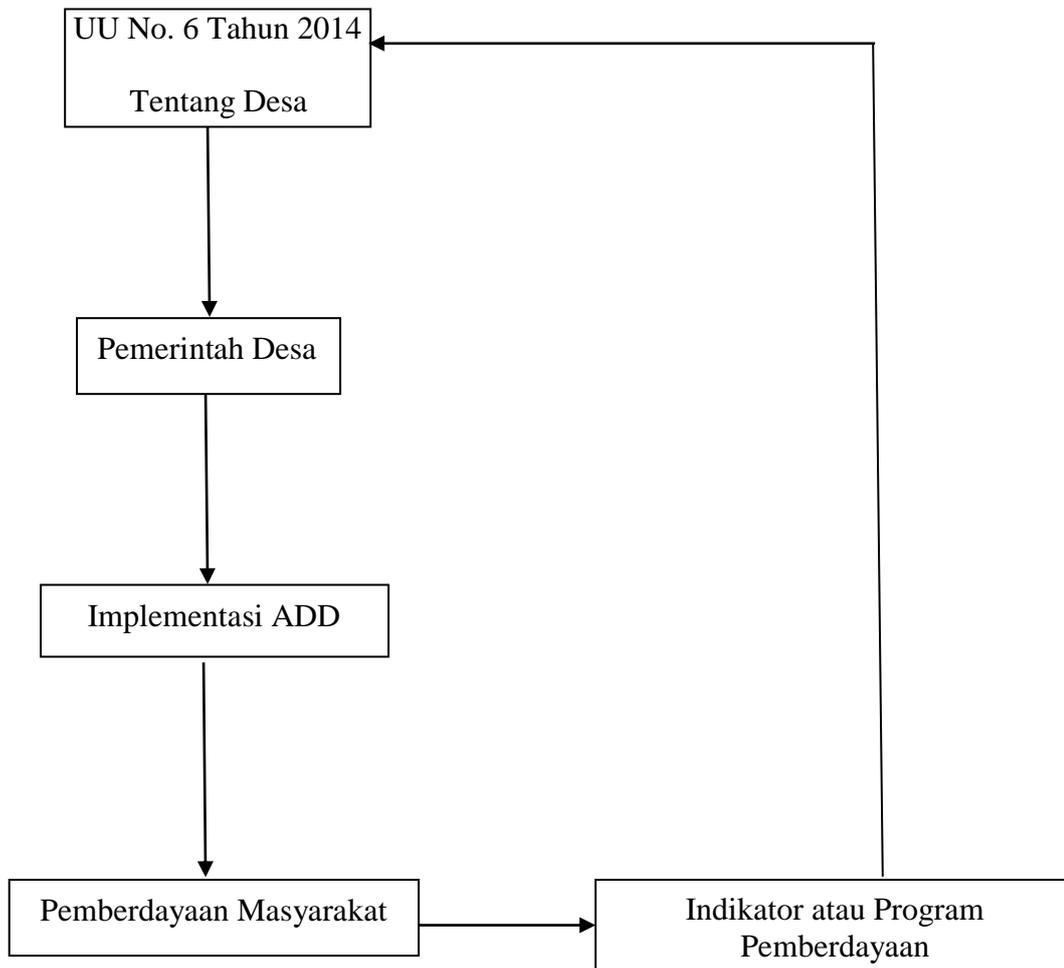
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jadi jelas definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**



## C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan

kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
2. Implementasi Kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat berdaya dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mampu berfungsi secara sosial.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. Maka kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Anggaran Dana Desa	-Tujuan dan Sasaran -Program -Efektif dan Efisien -Hambatan
2.	Pemberdayaan Masyarakat	-Sosialisasi -Penyuluhan Program -Berkelanjutan

#### **E. Informan atau Narasumber**

Menurut Sugiyono (2012 : 208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang ingin diteliti. Menurut David Williams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan narasumber yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat dan Masyarakat Desa.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

##### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a. Metode wawancara (Interview), yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.
- b. Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di lapangan.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

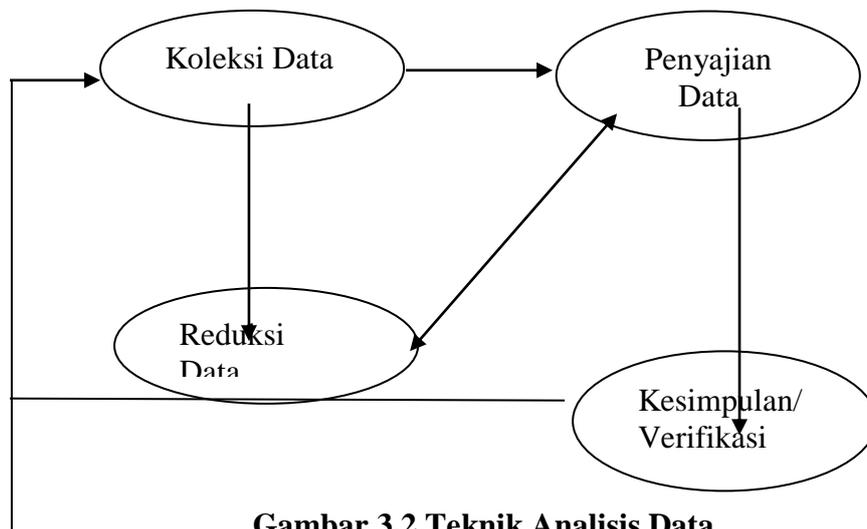
Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2012 : 246) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



**Gambar 3.2 Teknik Analisis Data**

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **H. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa tersebut tidak jauh dari pusat kota Aekkanopan yakni hanya kurang lebih satu jam waktu tempuh.

## **I. Gambaran Umum Kantor Desa Sukarame**

### **1. Sejarah Desa**

Diawali pada tahun 1943 dilakukanlah perintisan menuju Desa Sukarame yang pelaksanaannya diserahkan pada saudara Abdul Wahid dan kawan-kawan. Pada tahun 1943 dilakukan penggarapan awal lahan untuk dijadikan pertanian yang dilaksanakan Bapak Abdul Wahid sebagai kepala kampong Sukarame, kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tahun 1993 Desa Sukarame terjadi pemekaran lagi, desa Sukarame terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Desa Sukarame
2. Desa Sonomartani
3. Desa Sukarame Baru

Setelah berakhir masa jabatan kepala desa berganti dengan yang baru sebagai kepala desa Sukarame, kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sampai sekarang Desa Sukarame sudah dipimpin oleh 12 kepala desa.

### **2. Demografi Desa**

#### **a. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk**

Jumlah penduduk pada tahun 2017 di Desa Sukarame sebanyak 7.515 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sukarame**  
**Tahun 2017**

No.	Desa	Kependudukan		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah ( Ha )	Kepadatan (Jiwa/ Ha)
1.	Sukarame	7.530 jiwa	11.000 Ha	0.68

**Sumber : Data Kependudukan Desa Sukarame Tahun 2017**

Dari data tahun 2016-2017 tercatat jumlah penduduk Desa Sukarame sebanyak 7.530 Jiwa, yaitu: **7.530 jiwa x 1 jiwa = 0.68 jiwa/km ( 11.000 Ha )**. Adapun jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.848 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.628 jiwa. Dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), desa Sukarame dihuni oleh 2.200 Kepala Keluarga.

**b. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Sukarame masuk dalam wilayah Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berjaraka  $\pm$  12 Km dari Kantor Camat Kualuh Hulu dan terdiri dari 17 Dusun yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Leidong
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Aekkanopan Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ledong Timur

Jarak antara Ibukota desa dengan Ibukota kecamatan  $\pm$  12 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan. Desa Sukarame berada di atas permukaan laut terletak dijalur lalu lintas antara Desa Sukarame Baru dengan Desa Ledong Timur.

### **c. Tofografi dan Jenis Tanah**

Tanah di Desa Sukarame merupakan tanah campuran antara tanah liat dan tanah gambut dan sebagian besar tanah gambut berada di Dusun Darul Aman, Darul Aman Timur, Darul Aman Barat, Lubuk Pinang, Charly 18 Perk. PT. GDLP dan J-24 Perk. PT. GDLP.

#### **1. Iklim**

Desa Sukarame pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan September sampai Desember, berkisar di antara 2355-2366 mm setiap tahun sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Januari sampai Agustus. Suhu udara rata-rata 30 derajat Celsius, suhu udara terendah 27 derajat dan tertinggi 33 derajat dengan kelembaban udara 40%-100%.

### **3. Visi dan Misi Desa Sukarame**

#### **a. Visi Desa Sukarame**

Melayani masyarakat Desa Sukarame untuk mewujudkan warga yang sehat, pintar, dan sejahtera di dasari “**Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe**”. Visi pembangunan desa Sukarame tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah

Desa bersama masyarakat berkeinginan enam tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun bathin.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (demokratis, transparan, dan berkepedulian). Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (sehat, cerdas, dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

Desa Sukarame mempunyai visi “Sukarame Desa Bersemi” yang berarti Bersih artinya bersih lingkungannya, bersih aparatnya dari KKM, bersih masyarakatnya dari pelanggaran hokum, dan sejahtera yang artinya segala kebutuhan hidup warga dapat terpenuhi, segala kepentingan warga dapat terlayani, serta mandiri yang artinya mampu sendiri, tidak bergantung kepada bantuan pihak lain.

**b. Misi Desa Sukarame**

1. Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan.
2. Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih.
3. Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba.
4. Meningkatkan pendapatan warga masyarakat.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan.
6. Melestarikan tradisi gotong royong.
7. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan.

8. Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan dan kebutuhannya sendiri.
9. Menggunakan dana pemerintah secara efektif dan efisien.

#### **4. Susunan Pembagian Tugas dan Fungsi Kantor Desa Sukarame**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 bahwa susunan pembagian tugas dan fungsi setiap jabatan perangkat desa antara lain:

##### **a. Kepala Desa**

Tugas Kepala Desa yakni : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Kepala Desa yakni :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, social, budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **b. Sekretaris Desa**

Tugas sekretaris desa yakni : membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi sekretaris desa yakni :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan pelaporan.

#### **c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa**

Tugas yakni : membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Umum yakni :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **d. Kepala Urusan Keuangan Desa**

Tugas : membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi :

- 1) Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan.
- 2) Pengurusan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **e. Staf Operator Komputer**

Tugas : membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan desa.

Fungsi :

- 1) Membantu tugas-tugas Kaur keuangan desa dalam mempersiapkan dokumen laporan pertanggungjawaban rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **f. Bendahara Desa**

Tugas : membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan desa.

Fungsi :

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **g. Kepala Seksi Pemerintahan Desa**

Tugas : Membantu kepala desa sebagai tugas pelaksana operasional.

Fungsi :

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil desa.

2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

**h. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa**

Tugas : Membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi :

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan.
- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

**i. Kepala Seksi Pelayanan Desa**

Tugas : Membantu kepala desa sebagai tugas pelaksana operasional.

Fungsi :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

**j. Kepala Dusun**

Tugas : Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.

Fungsi :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.

- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

**5. Susunan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa diperlukan partisipasi seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga atau membangun sarana dan prasarana desa.

Adapun program kerja pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukarame adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2**  
**Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

<b>No.</b>	<b>Uraian Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Sumber Dana</b>
1.	Pembangunan Rabat Beton di Ranto Betul	Memudahkan transportasi masyarakat	Pembangunan sepanjang 200 M	APBDes
2.	Pembanguna Gedung Baru Kantor Desa	Meningkatkan pelayanan	1 Unit Gedung	APBDes

		Masyarakat		
3.	Rehab PAUD Hatinia Barokah	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	1 Unit Gedung	APBDes
4.	Pembuatan Parit Beton di Dusun Sukasari	Memudahkan saluran pembuangan air	Pembangunan sepanjang 400 M	APBDes

**Sumber : Data Program Pembangunan Desa 2017**

## **6. Susunan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pembinaan kemasyarakatan adalah upaya untuk mencapai kehidupan dan tatanan sosial desa yang lebih baik. Hal ini mencakup kerukunan, keamanan, ketertiban, ketentraman, kebersamaan dan gotong-royong. Melalui pembinaan kemasyarakatan ini, masyarakat didorong untuk mewujudkan terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram dimasyarakat. Adapun program pembinaan kemasyarakatan di Desa Sukarame adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.3  
Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sukarame**

<b>No.</b>	<b>Uraian Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Sumber Dana</b>
1.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Mengatasi kenakan remaja	1 Tahun	APBDes
2.	Kegiatan Pembinaan	Memberdayakan	1 Tahun	APBDes

	Organisasi Perempuan/ PKK	Perempuan		
3.	Kegiatan Kesenian dan Sosial Budaya	Memberdayakan Kesenian warga	1 Tahun	APBDes
4.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Menjaga harmonisasi sebagai warga yang berbeda keyakinan	1 Tahun	APBDes

**Sumber : Data Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2017**

#### **7. Susunan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi demikian pesatnya.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk :

- a. Menciptakan individu-individu yang mandiri.
- b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.

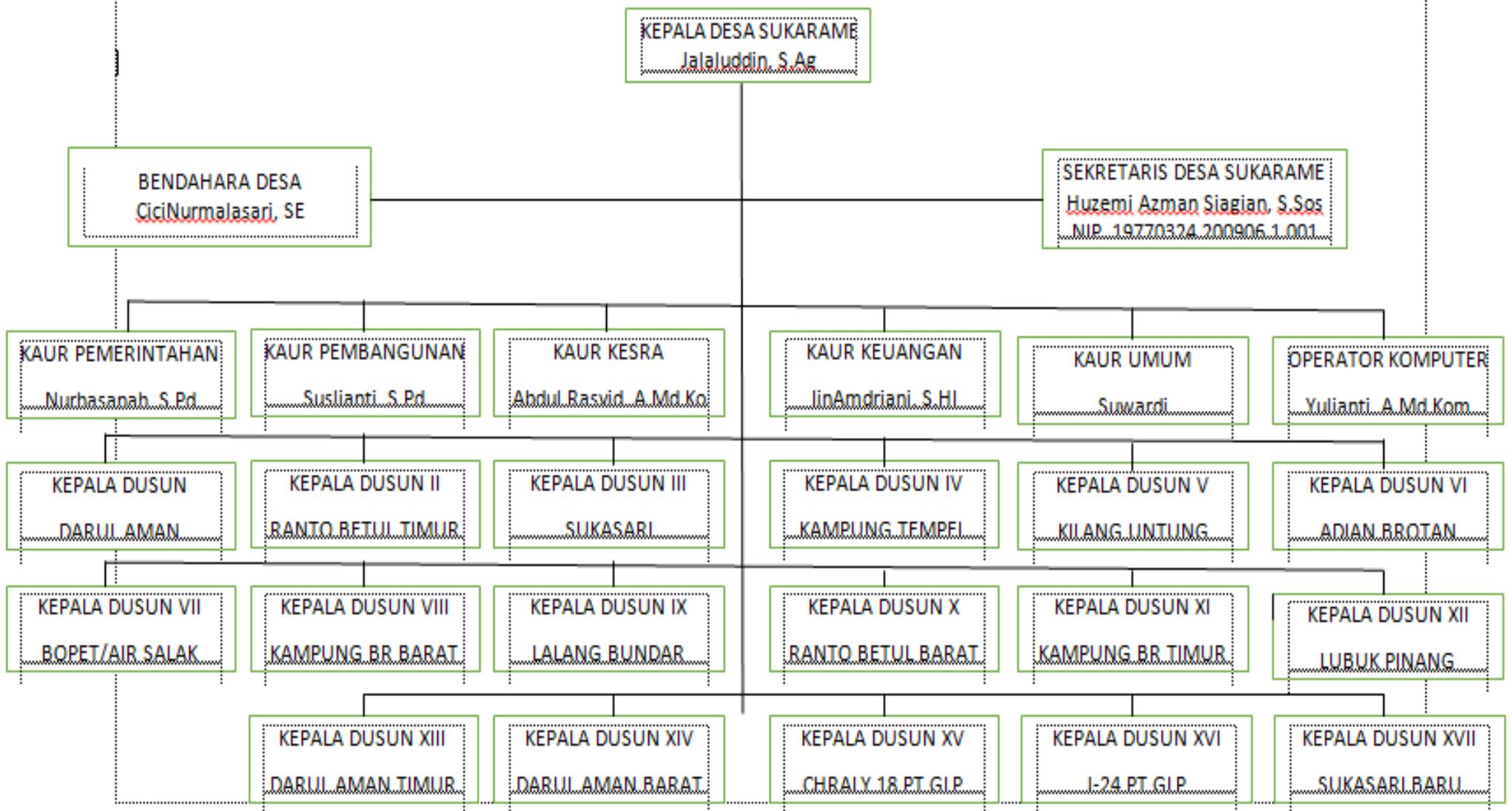
Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka Desa Sukarame memiliki program kerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 3.4****Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukarame**

<b>No.</b>	<b>Uraian Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Sumber Dana</b>
1.	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Tersedianya Aparatur Desa yang siap melayani	3 Kegiatan	APBDes
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	Meningkatkan Kesehatan	12 Bulan	APBDes
3.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Tani	Peningkatan Ekonomi	10 Ekor	APBDes
4.	Kegiatan Kapasitas Kelompok Pemuda	Pemahaman Bahaya Narkoba	1 Paket	ABBDes
5.	Kegiatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Peningkatan Keterampilan	1 Paket	APBDes

**Sumber : Data Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAH DESA SUKARAME**  
**KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penyajian Data Narasumber**

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber penelitian, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan.

Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan pelaksanaan dalam Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga analisis secara objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang ada digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan berikut ini:

##### **a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Laki-Laki	4	90 %
2.	Perempuan	1	10 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau persentase 90 %, sedangkan sisanya berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 1 orang atau persentase 10 %.

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan dari tingkat Pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, tingkat SD, SMP, SMA dan Sarjana. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.2**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	SD	0	0
2.	SMP	0	0
3.	SMA	1	10 %
4.	Sarjana	4	90 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2018**

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat Pendidikan sarjana sebanyak 4 orang dengan persentase 90% sedangkan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 10%.

**c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan**

Berdasarkan yang dilihat dari jabatan atau pekerjaannya, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, Pejabat Kantor Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Petani, dan Wiraswasta. Pada tabel 4.3 ini, kita akan melihat persentase untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki oleh narasumber.

**Tabel 4.3**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Pejabat Kantor Desa	2	55 %
2.	PNS	1	15 %
3.	Petani	1	15 %
4.	Wiraswasta	1	15 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2018**

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Sertifikasi Pemerintahan dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 55 %,

tingkat pekerjaan sebagai PNS yakni 1 orang atau 15 % sedangkan sebagai petani sebanyak 1 orang atau persentase 15 % dan sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang dengan frekuensi 15 %.

## **B. Analisa Data Wawancara**

### **1. Tujuan dan sasaran**

#### **a. Indikator Tujuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 dengan Bapak Jalaluddin, S. Ag selaku kepala desa Sukarame, bahwa tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa Sukarame seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan dari anggaran dana desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di desa Sukarame.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Huzemi Azman Siagian, S. Sos selaku sekretaris desa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk program-program pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Artinya dana desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan desa Sukarame. Dalam hal ini, fokus Pemerintahan Desa Sukarame menggunakan dana ini untuk program pembangunan desa baik infrastruktur maupun pembangunan Sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dengan Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra, tujuan dari anggaran dana desa antara lain untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, rahab sekolah dan juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 dengan Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di Desa Sukarame bahwa masyarakat mengetahui adanya program alokasi dana desa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan. Sepengetahuan beliau tujuan dari anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan desa seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi pertanian dan juga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemudian menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018 dengan Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa Sukarame bahwa beliau mengatakan tujuan anggaran dana desa setahu beliau digunakan untuk program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### b. Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku kepala desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Kantor Desa Sukarame, bahwa sasaran dari anggaran dana desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan juga untuk bidang pemberdayaan

masyarakat desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/kota Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku sekretaris desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 bahwa sasaran dari anggaran dana desa digunakan untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan parit beton, rehab bangunan kelas dan kantor dan juga untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku kepala urusan Kesra, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 bahwa sasaran dari anggaran dana desa digunakan untuk program pembangunan desa baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, bahwa sasaran anggaran dana desa yang beliau ketahui adalah untuk meningkatkan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, bahwa sasaran dari anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan dan juga

peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

## **2. Indikator Program**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku kepala desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, bahwa program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab Gedung PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan. setelah itu, ada program unggulan yang saat ini menjadi prioritas desa antara lain pemasangan jaringan internet kemasyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku sekretaris desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan adapun program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame kepada masyarakat yakni program pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan juga program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat serta ada program unggulan desa saat ini yang sedang dikerjakan oleh pelaksana pemasangan jaringan internet di desa Sukarame dengan tujuan agar masyarakat

mudah mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran dana desa yakni program-program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat seperti kegiatan kapasitas masyarakat kelompok petani dengan memberikan pengadaan berupa hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, disini beliau mempunyai keinginan mengenai alokasi dana desa seharusnya digunakan untuk program-program yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pengadaan lapangan olahraga dan program yang mendukung UKM masyarakat desa yang tujuannya untuk memberi aktivitas positif terhadap masyarakat atau pemuda agar terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, bahwa ada program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara kami masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga.

### **3. Indikator Efektif dan Efisien**

#### **a. Efektif**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program-program yang sudah menjadi sasaran Pemerintah Desa Sudah berjalan efektif atau tepat guna. Hal itu ditandainya dengan semua program yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Masyarakat meminta agar infrastruktur desa segera diperbaiki dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil perkebunannya.

Hal senada juga disampaikan melalui wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku sekretaris desa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang menjadi sasaran sudah berjalan efektif dan optimal dikarenakan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat desa dalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra, beliau mengatakan bahwa semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat berjalan efektif seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang kurang mampu diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di Desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan alhamdulillah terlaksana dengan baik dan

cukup efektif. Sepengetahuan beliau semua program yang dirancang oleh Pemerintah Desa sangat positif karena bertujuan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik. Itu saya lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat.

b. Efisien

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu, mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku Sekretaris Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa semua program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa berjalan tepat waktu dan efisien. Hal itu ditandai dengan banyaknya antusias masyarakat dalam mengawasi semua program-program desa yang berasal dari alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa semua program yang berkaitan dengan

kesejahteraan rakyat berjalan efisien dan tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang kurang mampu diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di Desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa berjalan tepat waktu dan efisien. Hal itu ditandai dengan program tersebut berdampak positif demi kemajuan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu. Itu saya lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat.

#### **4. Hambatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa hambatan yang dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program yang telah dibuat yakni dana yang diterima Pemerintah Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan keterlambatan dana ini, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku Sekretaris Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa kendala yang dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program adalah keterlambatan dana yang masuk dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan lambatnya Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra ketika diwawancarai dikantornya, beliau mengatakan hambatan yang sering terjadi dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program-program desa adalah dana yang turun dari Pemerintah Pusat mengalami keterlambatan. Contohnya untuk satu tahun anggaran, dana tersebut bisa saja cair per tiga bulan sekali/triwulan sehingga Pemerintah Desa terkadang kewalahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di Desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk terlibat dalam program-program Pemerintah Desa adalah kesibukan aktivitas masyarakat desa yang menyebabkan kurang antusiasnya keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa rata-rata hambatan yang dialami masyarakat untuk terlibat aktif dalam

program-program pemberdayaan adalah karena kesibukan aktivitas masyarakat yang mencari nafkah demi menghidupi keluarganya sehingga menyebabkan antusias masyarakat berkurang.

## **5. Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa setiap anggaran dana yang masuk baik itu bersifat anggaran dana desa maupun dana desa, disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan. Artinya masyarakat mengetahui dana yang masuk berapa untuk kebutuhan desa selama satu tahun kedepan. Disini juga sistem sosialisasinya Pemerintah Desa mengajak masyarakat didalam forum musyawarah desa dalam rangka merencanakan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan program yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut baik program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku Sekretaris Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa anggaran dana desa yang masuk ke kas desa harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui berapa dana yang masuk. Kemudian masyarakat juga dilibatkan dalam menentukan program-program prioritas desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra pada hari Rabu tanggal 7

Februari 2018, beliau juga mengatakan hal yang sama bahwa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan anggaran dana desa tersebut. Sosialisasi yang diberikan meliputi keterwakilan kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh masyarakat atau membuat papan informasi di Balai Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa alhamdulillah benar adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dana desa. Beliau sebagai tokoh pemuda melihat Pemerintah Desa merangkul seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, kepala dusun dan juga tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang anggaran dana desa tetapi berhubung keseharian beliau seorang petani maka yang biasanya datang ke kantor desa suami beliau pak Dogol.

## **6. Penyuluhan Program**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa penyuluhan program yang diberikan Pemerintah Desa biasanya yang berkaitan dengan Penyuluhan pertanian, narkoba dan keterampilan untuk perkumpulan ibu-ibu perwira dan juga PKK desa. Setiap ada penyuluhan

yang diberikan, masyarakat antusias datang ke Aula Desa untuk sama-sama belajar khususnya para ibu-ibu yang ingin menambah pengetahuan baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa disambut antusias oleh masyarakat khususnya para ibu-ibu yang ingin belajar mengetahui bagaimana membuat kerajinan tangan dari sampah anorganik dan sampah organik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program sangat antusias dimana peserta didominasi oleh kalangan ibu-ibu yang ingin belajar bagaimana cara membuat kerajinan tangan. Apabila ada diantara masyarakat yang tidak hadir pada saat penyuluhan, biasanya masyarakat yang tidak datang tersebut ditegur oleh pihak Desa agar lebih antusias lagi menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ketika ada program yang berkaitan dengan anggaran dana desa antara lain mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama ke aula desa untuk menyampaikan segala penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat,

biasanya penyuluhan mengenai penyaluran dan penggunaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa bentuk penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara.

## **7. Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jalaluddin, S.Ag selaku Kepala Desa Sukarame pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Huzemi Azman Siagian, S.Sos selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program-program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dijalankan secara terus-menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rasyid, A.Md.Kom selaku Kepala Urusan Kesra pada hari Rabu tanggal 7

Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rimba Bertuah Sitorus selaku tokoh pemuda di Desa Sukarame pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa program yang telah dibuat ada yang berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Sukarame dilatih untuk mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiyati selaku masyarakat desa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa salah satu keinginan dari masyarakat adanya program pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka penyajian satu persatu tentang jawaban responden diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

## **1. Adanya Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa Sukarame seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan dari anggaran dana desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di desa Sukarame. Artinya dana desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan desa Sukarame. Dalam hal ini, fokus Pemerintahan Desa Sukarame menggunakan dana ini untuk program pembangunan desa baik infrastruktur maupun pembangunan Sumber daya manusia.

Adapun sasaran dari anggaran dana desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan juga untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/kota Labuhanbatu Utara. anggaran dana desa digunakan untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan parit beton, rehab bangunan kelas dan kantor dan juga untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **2. Program**

Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab Gedung PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas

masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan. setelah itu, ada program unggulan yang saat ini menjadi prioritas desa antara lain pemasangan jaringan internet kemasyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi. Se jauh ini ada program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga.

### **3. Efektif dan Efisien**

Program-program yang sudah menjadi sasaran Pemerintah Desa Sudah berjalan efektif atau tepat guna. Hal itu ditandainya dengan semua program yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Masyarakat meminta agar infrastruktur desa segera diperbaiki dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil perkebunannya. Selain itu program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang kurang mampu diterima baik oleh masyarakat. Hal itu ditandai dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat desa dalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berjalan efektif

Se jauh ini program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu, mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya. Hal itu ditandai dengan banyaknya antusias

masyarakat dalam mengawasi semua program-program desa yang berasal dari alokasi dana desa.

Di lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat maka sejauh ini program program tersebut sudah berjalan efektif dan efisien.

#### **4. Hambatan**

Hambatan yang dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program yang telah dibuat yakni dana yang diterima Pemerintah Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan keterlambatan dana ini, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Contohnya untuk satu tahun anggaran, dana tersebut bisa saja cair per tiga bulan sekali/triwulan sehingga Pemerintah Desa kewalahan dalam menyusun APBDes.

Sementara itu di pihak masyarakat bahwa yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk terlibat dalam program-program Pemerintah Desa adalah kesibukan aktivitas masyarakat desa yang menyebabkan kurang antusiasnya keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

#### **5. Sosialisasi**

Sejauh ini setiap anggaran dana yang masuk baik itu bersifat anggaran dana desa maupun dana desa, disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan. Artinya masyarakat mengetahui dana yang masuk berapa untuk

kebutuhan desa selama satu tahun kedepan. Disini juga sistem sosialisasinya Pemerintah Desa mengajak masyarakat didalam forum musyawarah desa dalam rangka merencanakan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan program yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut baik program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Disini masyarakat di haruskan untuk terlibat dalam kegiatan anggaran dana desa tersebut. Sosialisasi yang diberikan meliputi keterwakilan kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh masyarakat atau membuat papan infomasi di Balai Desa. Untuk berpartisipasi dalam sosialisasi tentang penggunaan anggaran dana desa. Pemerintah Desa merangkul seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, kepala dusun dan juga tokoh masyarakat.

## **6. Penyuluhan program**

Penyuluhan program yang diberikan Pemerintah Desa biasanya yang berkaitan dengan Penyuluhan pertanian, narkoba dan keterampilan untuk perkumpulan ibu-ibu perwiritan dan juga pkk desa. Setiap ada penyuluhan yang diberikan, masyarakat antusias datang ke Aula Desa untuk sama-sama belajar khususnya para ibu-ibu yang ingin menambah pengetahuan baru. penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa disambut antusias oleh masyarakat khususnya para ibu-ibu yang ingin belajar mengetahui bagaimana membuat kerajinan tangan dari sampah anorganik dan sampah organik.

keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program sangat antusias dimana peserta didominasi oleh kalangan ibu-ibu yang ingin belajar bagaimana cara membuat kerajinan tangan. Apabila ada diantara masyarakat yang tidak hadir

pada saat penyuluhan, biasanya masyarakat yang tidak datang tersebut ditegur oleh pihak Desa agar lebih antusias lagi menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Selain itu, penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ketika ada program yang berkaitan dengan anggaran dana desa antara lain mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama ke aula desa untuk menyampaikan segala penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat, biasanya penyuluhan mengenai penyaluran dan penggunaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan secara terus menerus. Dan bentuk penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara.

## **7. Berkelanjutan**

Program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa. program-program tersebut dijalankan secara terus-menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Adapun Program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala

desa dan perangkat desa. program yang telah dibuat ada yang berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Sukarame dilatih untuk mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya. Hal tersebut tak terlepas dari keinginan masyarakat adanya program pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus serta berkelanjutan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa sudah terealisasi pemberdayaan dan pembangunan di Desa Sukarame sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu yang pertama adanya tujuan dan sasaran mulai dari penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang langsung melibatkan kantor Desa dan masyarakat.

Kedua, adanya program yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada dan program dijalankan secara sistematis. Hal ini ditandai dengan adanya program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab Gedung PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, kegiatan

pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.

Ketiga, adanya kerjasama dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan sehingga program-program tersebut dapat berjalan. Di lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat maka sejauh ini program program tersebut sudah berjalan efektif dan efisien

Keempat, adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Sukarame ialah keterlambatan turunnya dana dari Pemerintah Pusat sehingga program-program yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan dalam realisasinya. Disamping itu, adapun hambatan lain ialah adanya kesibukan aktivitas masyarakat desa yang menyebabkan kurang antusiasnya keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Kelima, adanya proses dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur sudah disosialisasikan dan melibatkan lapisan masyarakat. Hal tersebut, adalah cerminan partisipasi masyarakat.

Keenam, setiap program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui tahap penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk program-program pemberdayaan dan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa.

Ketujuh, program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa diimplementasikan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan Pendidikan/pelatihan kepala desa dan perangkat desa.

Dari ketujuh kategorisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, namun juga tidak terlepas dengan kendala-kendala yang ada seperti lambatnya aliran dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa sehingga menimbulkan keterlambatan Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menjalankan program-program. Adapun hambatan lain dikarenakan kesibukan aktivitas masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tidak dapat optimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian, maka ada beberapa saran sederhana yang disampaikan penulis antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa yang seharusnya lebih difokuskan untuk program-program pemberdayaan masyarakat bukan pada pembangunan infrastruktur.

2. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam seluruh program-program yang berkaitan dengan anggaran dana desa.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jangan mempersulit masyarakat ketika ingin mengurus perizinan yang berkaitan dengan perizinan kepemilikan tanah dan menyapu bersih oknum-oknum yang terlibat pungutan liar (Pungli).
4. Setiap program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa hendaknya dilakukan evaluasi yang mendalam agar program yang telah terlaksana efektif dan efisien.
5. Transparansi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bila perlu di setiap dusun dibuat papan informasi berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam membuat program kerja Pemerintah Desa untuk tercapainya visi dan misi Desa yang sejahtera.
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan mentalitas Perangkat Desa agar lebih cakap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika : Jakarta.
- Agustino Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia : Bandung.
- Jusman, La Ode. 2016. Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Skripsi Universitas Halu Oleo.
- Mardikantodkk, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta : Bandung
- Mardikanto, Soebiato, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Makawimbang Ferry, 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa*. Libri : Jakarta
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya : Bandung
- Nugroho, Riant 2004: *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nurdin, Usman 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung

### **Sumber Perundang-undangan :**

- Lembaran Negara Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Pembagian Tugas Perangkat Desa

Peraturan Desa Sukarame Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS**

Nama : FAIZUL HAMDHI HASIBUAN  
Tempat/Tanggal Lahir : AEK KANOPAN, 09 OKTOBER 1995  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : JL. MELATI LK III AEK KANOPAN  
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Agama : ISLAM  
Warga Negara : INDONESIA  
Anak Ke : 3 (TIGA)

### **2. NAMA ORANG TUA**

Ayah : SYAHRUL ADNAN HASIBUAN, SE  
Ibu : RISMAWATI

### **3. PENDIDIKAN**

- a. SD Negeri 112280 Tahun 2008, Berijazah
- b. SMP Negeri 1 Kualuh Hulu 2011, Berijazah
- c. SMA Negeri 1 Kualuh Hulu 2014, Berijazah
- d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 sampai sekarang.  
Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis,

**Faizul Hamdi Hasibuan**

**DAFTAR WAWANCARA**  
( Untuk Perangkat Desa Sukarame )

Nama : Bapak Jalaluddin, S.Ag

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Desa Sukarame

A. Implementasi Anggaran Dana Desa

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Apakah tujuan dari implementasi anggaran dana desa (ADD) di Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa Sukarame seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan dari anggaran dana desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di desa Sukarame.

- b. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau hanya kebijakan Pemerintah Desa?

Jawab : Tujuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Desa karena Desa diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri.

- c. Apa alasan Pemerintah Desa Sukarame mengalokasikan Anggaran Dana Desa hanya fokus pada bidang pembangunan sementara dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007, ADD juga digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat?

Jawab : Alasan Pemerintah Desa karena wilayah Desa Sukarame sangat luas dan memerlukan perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga Rehab Gedung sekolah, kantor dan lain sebagainya.

d. Apakah yang menjadi sasaran Anggaran dana desa tersebut?

Jawab : Sasaran dari anggaran dana desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan juga untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/kota Labuhanbatu Utara.

2. Program

a. Program-program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame hingga saat ini?

Jawab : Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab Gedung PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.

b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan anggaran dana desa di Desa Sukarame?

Jawab : Program unggulan yang saat ini menjadi prioritas desa antara lain pemasangan jaringan internet kemasyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi.

### 3. Efektif dan Efisien

- a. Sejauh ini, apakah program yang telah menjadi sasaran sudah berjalan efektif atau kah sudah tepat?

Jawab : Program-program yang sudah menjadi sasaran Pemerintah Desa Sudah berjalan efektif atau tepat guna. Hal itu ditandainya dengan semua program yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Masyarakat meminta agar infrastruktur desa segera diperbaiki dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil perkebunannya.

- b. Apakah program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sukarame, dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu?

Jawab : program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu, mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya.

### 4. Hambatan

- a. Apakah yang menjadi kendala/hambatan Pemerintah desa dalam menjalankan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Hambatan yang dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program yang telah dibuat yakni dana yang diterima Pemerintah Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan keterlambatan dana ini, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- b. Hambatan yang bagaimana biasanya paling rumit dalam proses penyelesaiannya?

Jawab : Bagi kami semua hambatan tidak ada yang paling rumit, hanya saja ketika ada hambatan kami memerlukan waktu hingga beberapa hari untuk menyelesaikannya seperti merancang program rencana strategis desa enam tahun kedepan.

## B. Pemberdayaan Masyarakat

### 5. Sosialisasi

- a. Adakah tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukarame dalam mensosialisasikan program alokasi dana desa ini?

Jawab : Tindakan kami ada, setiap anggaran dana yang masuk baik itu bersifat anggaran dana desa maupun dana desa, disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan. Artinya masyarakat mengetahui dana yang masuk berapa untuk kebutuhan desa selama satu tahun kedepan.

- b. Biasanya, sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat, apakah hanya menyampaikan sosialisasi kepada perwakilan kepala dusun, kepala keluarga atau keseluruhan masyarakat?

Jawab : Disini juga sistem sosialisasinya Pemerintah Desa mengajak masyarakat didalam forum musyawarah desa dalam rangka merencanakan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan program yang bersumber dari

anggaran dana desa tersebut baik program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

#### 6. Penyuluhan Program

- a. Seberapa besar keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukarame?

Jawab : Masyarakat antusias mengikuti setiap penyuluhan program yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

- b. Apabila Masyarakat tidak hadir pada saat Penyuluhan, apakah ada tindakan atau sejenis sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat?

Jawab : Tidak ada tindakan tegas yang diberikan Pemerintah Desa hanya saja kami disini memberikan teguran secara persuasive kepada masyarakat.

#### 7. Berkelanjutan

- a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan?

Jawab : Program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa.

b. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas alokasi dana desa, apakah Pemerintah Desa Sukarame berhasil untuk menerapkan program-program pemberdayaan tersebut?

Jawab : Menurut kami segala program yang telah kami laksanakan sudah berjalan dengan baik. Hal itu bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur yang setiap tahunnya berjalan dan juga program pemberdayaan masyarakat.

**DAFTAR WAWANCARA**  
( Untuk Perangkat Desa Sukarame )

Nama : Bapak Huzemi Azman Siagian, S. Sos

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Sekretaris Desa Sukarame

C. Implementasi Anggaran Dana Desa

8. Tujuan dan Sasaran

- e. Apakah tujuan dari implementasi anggaran dana desa (ADD) di Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Tujuan dari anggaran dana desa yakni untuk program-program pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Artinya dana desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan desa Sukarame. Dalam hal ini, fokus Pemerintahan Desa Sukarame menggunakan dana ini untuk program pembangunan desa baik infrastruktur maupun pembangunan Sumber daya manusia.

- f. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau hanya kebijakan Pemerintah Desa?

Jawab : Tujuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Desa karena Desa diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri dan menentukan kebijakan sendiri.

- g. Apa alasan Pemerintah Desa Sukarame mengalokasikan Anggaran Dana Desa hanya fokus pada bidang pembangunan sementara dalam

Permendagri No. 37 Tahun 2007, ADD juga digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat?

Jawab : Alasan Pemerintah Desa karena wilayah Desa Sukarame sangat luas dan memerlukan perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga Rehab Gedung sekolah, kantor dan lain sebagainya dan juga dikarenakan permintaan mayoritas masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan insfrastruktur di Desa agar lebih baik.

h. Apakah yang menjadi sasaran Anggaran dana desa tersebut?

Jawab : Sasaran dari anggaran dana desa digunakan untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan parit beton, rehab bangunan kelas dan kantor dan juga untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 9. Program

c. Program-program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame hingga saat ini?

Jawab : Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame kepada masyarakat yakni program pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan juga program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat.

d. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan anggaran dana desa di Desa Sukarame?

Jawab : Ada program unggulan desa saat ini yang sedang dikerjakan oleh pelaksana pemasangan jaringan internet di desa Sukarame dengan tujuan

agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa.

#### 10. Efektif dan Efisien

- c. Sejauh ini, apakah program yang telah menjadi sasaran sudah berjalan efektif ataukah sudah tepat?

Jawab : Program yang menjadi sasaran sudah berjalan efektif dan optimal dikarenakan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat desa dalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- d. Apakah program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sukarame, dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu?

Jawab : Semua program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa berjalan tepat waktu dan efisien. Hal itu ditandai dengan banyaknya antusias masyarakat dalam mengawasi semua program-program desa yang berasal dari alokasi dana desa.

#### 11. Hambatan

- c. Apakah yang menjadi kendala/hambatan Pemerintah desa dalam menjalankan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Kendala yang dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program adalah keterlambatan dana yang masuk dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan lambatnya Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- d. Hambatan yang bagaimana biasanya paling rumit dalam proses penyelesaiannya?

Jawab : Kalau hambatan yang paling rumit biasanya keterbatasan dana yang sedikit sehingga program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dikerjakan secara bertahap.

#### D. Pemberdayaan Masyarakat

##### 12. Sosialisasi

- c. Adakah tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukarame dalam mensosialisasikan program alokasi dana desa ini?

Jawab : Tindakan Pemerintah Desa ada, biasanya dana yang masuk ke kas Desa disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas.

- d. Biasanya, sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat, apakah hanya menyampaikan sosialisasi kepada perwakilan kepala dusun, kepala keluarga atau keseluruhan masyarakat?

Jawab : Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan keterwakilan masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan juga perwakilan setiap dusun ke aula desa.

##### 13. Penyuluhan Program

- c. Seberapa besar keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukarame?

Jawab : Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- d. Apabila Masyarakat tidak hadir pada saat Penyuluhan, apakah ada tindakan atau sejenis sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat?

Jawab : Tidak ada tindakan tegas yang diberikan Pemerintah Desa hanya saja kami disini memberikan teguran secara persuasive kepada masyarakat.

#### 14. Berkelanjutan

- c. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan?

Jawab : Program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa.

- d. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas alokasi dana desa, apakah Pemerintah Desa Sukarame berhasil untuk menerapkan program-program pemberdayaan tersebut?

Jawab : Menurut kami segala program yang telah kami laksanakan sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal itu bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur yang setiap tahunnya berjalan dan juga program pemberdayaan masyarakat.

**DAFTAR WAWANCARA**  
( Untuk Perangkat Desa Sukarame )

Nama : Bapak Abdul Rasyid,A.Md. Kom

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Urusan Kesra Desa Sukarame

E. Implementasi Anggaran Dana Desa

15. Tujuan dan Sasaran

- i. Apakah tujuan dari implementasi anggaran dana desa (ADD) di Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Tujuan dari anggaran dana desa antara lain untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, rahab sekolah dan juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat.

- j. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau hanya kebijakan Pemerintah Desa?

Jawab : Telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sukarame.

- k. Apa alasan Pemerintah Desa Sukarame mengalokasikan Anggaran Dana Desa hanya fokus pada bidang pembangunan sementara dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007, ADD juga digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat?

Jawab : Karena wilayah Desa Sukarame sangat luas dan memerlukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dan juga dikarenakan permintaan masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan insfrastruktur di Desa agar lebih baik.

1. Apakah yang menjadi sasaran Anggaran dana desa tersebut?

Jawab : Sasaran dari anggaran dana desa digunakan untuk program pembangunan desa baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

#### 16. Program

e. Program-program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame hingga saat ini?

Jawab : Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran dana desa yakni program-program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat seperti kegiatan kapasitas masyarakat kelompok petani dengan memberikan pengadaan berupa hewan ternak.

f. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan anggaran dana desa di Desa Sukarame?

Jawab : Program unggulan saat ini yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Sukarame adalah pemasangan jaringan internet desa.

#### 17. Efektif dan Efisien

e. Sejauh ini, apakah program yang telah menjadi sasaran sudah berjalan efektif atau kah sudah tepat?

Jawab : Semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat berjalan efektif seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang kurang mampu diterima baik oleh masyarakat.

- f. Apakah program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sukarame, dalam pelaksanaannya sudah tepat waktu?

Jawab : Semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat berjalan efisien dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.

#### 18. Hambatan

- e. Apakah yang menjadi kendala/hambatan Pemerintah desa dalam menjalankan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Sukarame tersebut?

Jawab : Hambatan yang sering terjadi dialami Pemerintah Desa dalam menjalankan program-program desa adalah dana yang turun dari Pemerintah Pusat mengalami keterlambatan. Contohnya untuk satu tahun anggaran, dana tersebut bisa saja cair per tiga bulan sekali/triwulan sehingga Pemerintah Desa terkadang kewalahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- f. Hambatan yang bagaimana biasanya paling rumit dalam proses penyelesaiannya?

Jawab : Kalau hambatan yang paling rumit biasanya keterbatasan dana yang sedikit sehingga program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dikerjakan secara bertahap.

#### F. Pemberdayaan Masyarakat

## 19. Sosialisasi

- e. Adakah tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukarame dalam mensosialisasikan program alokasi dana desa ini?

Jawab : Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan anggaran dana desa tersebut. Sosialisasi yang diberikan meliputi keterwakilan kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh masyarakat atau membuat papan informasi di Balai Desa.

- f. Biasanya, sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat, apakah hanya menyampaikan sosialisasi kepada perwakilan kepala dusun, kepala keluarga atau keseluruhan masyarakat?

Jawab : Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan keterwakilan masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan juga perwakilan setiap dusun ke aula desa.

## 20. Penyuluhan Program

- e. Seberapa besar keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukarame?

Jawab : Keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan program sangat antusias dimana peserta didominasi oleh kalangan ibu-ibu yang ingin belajar bagaimana cara membuat kerajinan tangan.

- f. Apabila Masyarakat tidak hadir pada saat Penyuluhan, apakah ada tindakan atau sejenis sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat?

Jawab : Apabila ada diantara masyarakat yang tidak hadir pada saat penyuluhan, biasanya masyarakat yang tidak datang tersebut ditegur oleh pihak Desa agar lebih antusias lagi menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

#### 21. Berkelanjutan

- e. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan?

Jawab : Program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa.

- f. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas alokasi dana desa, apakah Pemerintah Desa Sukarame berhasil untuk menerapkan program-program pemberdayaan tersebut?

Jawab : Menurut kami segala program yang telah kami laksanakan sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal itu bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur yang setiap tahunnya berjalan dan juga program pemberdayaan masyarakat.

**DAFTAR WAWANCARA**  
( Untuk Masyarakat Desa Sukarame )

Nama : Bapak Rimba Bertuah Sitorus, SE

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

A. Implementasi Anggaran Dana Desa

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sukarame?

Jawab : Masyarakat mengetahui adanya program alokasi dana desa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan.

- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dan sasaran dari alokasi dana desa tersebut?

Jawab : Sepengetahuan saya tujuan dari anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan desa seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi pertanian dan juga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan sasaran anggaran dana desa yang saya ketahui adalah untuk meningkatkan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Program

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu program-program dana desa yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame, apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawab : Menurut saya tidak semua program yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Program-program yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawab : Saya mempunyai keinginan mengenai alokasi dana desa seharusnya digunakan untuk program-program yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pengadaan lapangan olahraga dan program yang mendukung UKM masyarakat desa yang tujuannya untuk memberi aktivitas positif terhadap masyarakat dan pemuda agar terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

### 3. Efisien dan Efektif

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, Apakah program pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame sudah tepat dalam proses pelaksanaannya?

Jawab : alhamdulillah terlaksana dengan baik dan cukup efektif. Sepengetahuan saya semua program yang dirancang oleh Pemerintah Desa sangat positif karena bertujuan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Adakah dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam program-program pemberdayaan?

Jawab : Ada, seperti memberikan bantuan ternak kepada masyarakat.

#### 4. Hambatan

- a. Apakah yang menjadi hambatan/kendala masyarakat untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan ,masyarakat?

Jawab : Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk terlibat dalam program-program Pemerintah Desa adalah kesibukan aktivitas masyarakat desa yang menyebabkan kurang antusiasnya keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

- b. Hambatan seperti apakah yang biasanya paling rumit, apakah pemerintah desa tidak menginformasikan atau bagaimana?

Jawab : Bagi kami hambatan yang paling rumit adalah kesibukan aktivitas kami sehari-hari. Pemerintah Desa menginformasikan setiap program Desa melalui papan informasi yang ada di kantor desa.

#### B. Pemberdayaan Masyarakat

##### 5. Sosialisasi

- a. Apakah Pemerintah Desa Sukarame mensosialisasikan adanya program alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat?

Jawab : alhamdulillah benar adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dana desa. Saya sebagai tokoh pemuda

melihat Pemerintah Desa merangkul seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, kepala dusun dan juga tokoh masyarakat.

- b. Ketika Pemerintah Desa Sukarame mensosialisasikan program, Apakah melibatkan seluruh masyarakat atau hanya beberapa perwakilan kepala dusun dan kepala keluarga?

Jawab : Melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, kepala dusun dan juga tokoh masyarakat. Tetapi hanya perwakilannya saja.

#### 6. Penyuluhan Program

- a. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukarame ketika ada program-program berkaitan dengan alokasi dana desa?

Jawab : Bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ketika ada program yang berkaitan dengan anggaran dana desa antara lain mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama ke aula desa untuk menyampaikan segala penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat, biasanya penyuluhan mengenai penyaluran dan penggunaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan secara terus menerus.

- b. Biasanya penyuluhan mengenai apa saja?

Jawab : Penyuluhan tentang penggunaan Anggaran dana desa, penyuluhan bahaya penggunaan narkoba, penyuluhan tentang program-program desa.

- c. Apakah penyuluhan dilakukan secara terus-menerus?

Jawab : Iya, dilakukan secara terus-menerus.

#### 7. Berkelanjutan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan?

Jawab : Program yang telah dibuat ada yang berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Sukarame dilatih untuk mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya.

- b. Apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

Jawab : Kalau menurut saya sudah baik dan seharusnya lebih ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat untuk keluarga miskin.

**DAFTAR WAWANCARA**  
( Untuk Masyarakat Desa Sukarame )

Nama : Ibu Sumiyati

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani Ubi

C. Implementasi Anggaran Dana Desa

8. Tujuan dan Sasaran

c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sukarame?

Jawab : Saya mengetahui adanya program alokasi dana desa yang digunakan untuk program pembangunan.

d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dan sasaran dari alokasi dana desa tersebut?

Jawab : Tujuan anggaran dana desa setahu saya digunakan untuk program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sementara sasarannya untuk pembangunan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

9. Program

c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu program-program dana desa yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame, apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawab : Sebagian program sesuai dan sebagiannya lagi tidak karena kami butuh program yang bersifat membantu perekonomian keluarga.

d. Program-program yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawab : Program tentang peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga.

#### 10. Efisien dan Efektif

c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, Apakah program pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame sudah tepat dalam proses pelaksanaannya?

Jawab : program yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik. Itu saya lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat.

d. Adakah dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam program-program pemberdayaan?

Jawab : Ada, bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah Desa sangat membantu ekonomi keluarga.

#### 11. Hambatan

c. Apakah yang menjadi hambatan/kendala masyarakat untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan ,masyarakat?

Jawab : Rata-rata hambatan yang dialami masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program pemberdayaan adalah karena kesibukan aktivitas masyarakat yang mencari nafkah demi menghidupi keluarganya sehingga menyebabkan antusias masyarakat berkurang.

d. Hambatan seperti apakah yang biasanya paling rumit, apakah pemerintah desa tidak menginformasikan atau bagaimana?

Jawab : Bagi kami hambatan yang paling rumit adalah kesibukan aktivitas kami sehari-hari. Pemerintah Desa menginformasikan setiap program Desa melalui papan informasi yang ada di kantor desa.

#### D. Pemberdayaan Masyarakat

##### 12. Sosialisasi

c. Apakah Pemerintah Desa Sukarame mensosialisasikan adanya program alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat?

Jawab : Pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang anggaran dana desa tetapi berhubung keseharian saya seorang petani maka yang biasanya datang ke kantor desa suami saya.

d. Ketika Pemerintah Desa Sukarame mensosialisasikan program, Apakah melibatkan seluruh masyarakat atau hanya beberapa perwakilan kepala dusun dan kepala keluarga?

Jawab : Setau saya melibatkan semua masyarakat.

##### 13. Penyuluhan Program

d. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukarame ketika ada program-program berkaitan dengan alokasi dana desa?

Jawab : Bentuk penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara.

e. Biasanya penyuluhan mengenai apa saja?

Jawab : Penyuluhan bahaya penggunaan narkoba, penyuluhan tentang program-program desa.

f. Apakah penyuluhan dilakukan secara terus-menerus?

Jawab : Kurang Tau saya.

#### 14. Berkelanjutan

c. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Sukarame kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan?

Jawab : Kalau program pembangunan dilakukan secara terus-menerus, hanya saja disini saya mempunyai keinginan Kalau bisa ada program pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

d. Apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

Jawab : Program pembangunan berjalan dengan baik.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610460 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umau.ac.id> E-mail: [rektor@umau.ac.id](mailto:rektor@umau.ac.id)

Tempat  
Lagar disetujui

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Sk-1

ada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial  
IP UMSU

Medan, 01 November ..... 2017...

dan.  
*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : FAIZUL HAMDI HASIBUAN  
N P M : 1403090019  
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Tabungan sks : 152 sks, IP Kumulatif 3,70...

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Disetujui	Disetujui
Mangfaat Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sutarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara	X	✓
Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sutarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara	✓	2/11/2017 Ka. Prodi A.
Implementasi Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Petani melalui Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	X	✓

Bersama permohonan ini saya lampirkan :  
anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;  
aftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.  
anda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)  
Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan  
a kasih. Wassalam.

mendasi Ketua Jurusan :  
iskan kepada Dekan untuk  
apan Judul dan Pembimbing.

na, tgl. 01 November ..... 2017...

202

Pemohon,  
Dr. Mohd. Jusri  
(Faizul Hamdi Hasibuan)

Kepa,  
M. Saifuddin, S.Sos., M.S.P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 202 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2017**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tertanggal **02 November 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FAIZUL HAMDY HASIBUAN**  
NPM : 1403090019  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/ 2018  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA  
SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.**

Pembimbing I : **Dr. Mohammad Yusri., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: **02 November 2018 .**

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal : 13 Safur 1439 H  
03 November 2017 M



**Dr. Tisri Syam., M.Si.**

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : **052/ KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018**  
Lampiran : -,-  
Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 07 DjumadiAwwal 1439 H  
24 Januari 2018 M

**Kepada : Yth, Kepala Desa Sukarame**  
**Kecamatan Kualuh Hulu**  
**Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
di -  
**Tempat**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu ( S1 ), kami mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **FAIZUL HAMDY HASIBUAN**  
N P M : 1403090019  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/2018  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKARAME  
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA .**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Drs. TASRIF SYAM, M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**KECAMATAN KUALUH HULU**  
**KEPALA DESA SUKARAME**

**ALAMAT : JALAN MUHAMMAD NUR SITOMPUL NOMOR TELEPON....**  
**Kode Pos – 21457**

Sukarame, tanggal 05 Pebruari 2018

Nomor : 470/ 77 /Pem/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :  
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.  
di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas nama :

Nama : **FAIZUL HAMDY HASIBUAN**  
NPM : 1403090019  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018.  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUKARAME,  
KECAMATAN KUALUH HULU, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 052/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018, Tanggal 24 Januari 2018, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami Pihak Pemerintah Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara Menyetujui dan memberikan izin Penelitian guna untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara."

Demikianlah hal ini kami sampaikan dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

**PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

ada Yth.

Medan, 28 Desember 2017.

ak Dekan FISIP UMSU

lan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : FAIZUL HAMDI HASIBUAN  
 N P M : 1403090019  
 Jurusan : ILMU KESEHATAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 707/SK/II.3/UMSU-03/F/2017... tanggal 02 November 2017 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
 Pembimbing

Pemohon,

*(Dr. Mohammad Yusri, M.Si.)*

*(FAIZUL HAMDI HASIBUAN)*

Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Hari, Tanggal : Senin, 15 Januari 2018  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU  
 Pemimpin Seminar : ARIFIN SALEH, Dr. M.SP

No	Nama Mahasiswa (Ponyali)	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Pada Es (Judul)	Judul (Topik) (Batas)
1	MUHAMMAD NAZRI MANDAY	1403090014	1 ABDUL JALAL BATUBARA, Drs, M.AP	1 MOHD YUSRI, Dr, M.Si	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA
2	NOVITA FAWALI	1403090034	1 MOHD YUSRI, Dr, M.Si	1 ABDUL JALAL BATUBARA, Drs, M.AP	ANALISIS MANFAAT PROGRAM BERAS MISKIN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA PEMATANG SIANTAR GANJANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3	MIRHAIL CHANDRA PRADANA	1403090023	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si	1 ABDUL JALAL BATUBARA, Drs, M.AP	EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM MENINGKATKAN HARD SKILL DAN SOFT SKILL ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA DI TANJUNG MORAWA
4	ASNAWI AHMAD	1403090004	1 ABDUL JALAL BATUBARA, Drs, M.AP	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si	MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA ULUNG BAWANG KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
5	FAZLUL HAMDI HASIBUAN	1403090019	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Medan, 22 Rabiul Akhir 1438 H  
 15 Januari 2018 M

An Deskriptor  
  
 Dr. ZUL FAHMI, M.I.Kom.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

nama lengkap : FAIZUL HAMDY HASIBUAN  
 NPM : 1403090014  
 jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 judul Skripsi : Implementasi Anggaran Pans Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	13/12/2017	Bimbingan dan Revisi proposal skripsi	↓
	27/12/2017	Bimbingan dan Revisi proposal skripsi	↓
	28/12/2017	Bimbingan dan Acc Seminar proposal	↓
	21/1/2018	Bimbingan Daftar wawancara	↓
	20/2/2018	Bimbingan dan Revisi Skripsi (Bab 4 dan 5)	↓
	26/2/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (Pembahasan)	↓
	1/3/2018	Bimbingan dan Revisi Skripsi (Bab 5)	↓
	5/3/2018	Bimbingan dan Revisi Abstrak	↓
	16/3/2018	Bimbingan dan Acc Sidang Meja Hijau	↓

Medan, 12 Maret ..... 2018

Dekan,  
  
 ....., M.Si

Ketua Program Studi,  
  
 Dr. Anfin Saleh, S.Sos. M.Si

Pembimbing ke : 1..  
  
 Dr. Mohd Yucni, M.Si